

## **Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022**

**Dwi Ahmadi<sup>1</sup>, Marselina<sup>2</sup>**

Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen/bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen/terikat 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung selama 2018-2022 menggunakan aplikasi E-Views 10 data panel. Uji terbaik dalam model regresi ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan melalui Uji Chow. Secara parsial kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Kemandirian Fiskal Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

### **Abstract**

*The aim of this research is to examine how regional fiscal independence, the regency/city minimum wage, capital expenditure, and the human development index—treated as independent variables—impact economic growth, which is the dependent variable, in 15 regencies/cities in Lampung Province during the period from 2018 to 2022, using the E-Views 10 panel data application. The best test for this regression model employs the Fixed Effect Model (FEM) through the Chow Test. The results indicate that regional fiscal independence positively and significantly affects economic growth. Conversely, the regency/city minimum wage has a significant negative impact on economic growth. Additionally, capital expenditure and the human development index exhibit a significant positive effect on economic growth. Overall, the simultaneous effects of regional fiscal independence, the regency/city minimum wage, capital expenditure, and the human development index significantly impact economic growth in the 15 districts/cities in Lampung Province.*

**Keywords:** Capital Expenditure, Human Development Index, Regional Fiscal Independence, Economic Growth, and Regency/City Minimum Wage.

Copyright (c) 2024 Hariany Idris

---

✉ Corresponding author :

## **PENDAHULUAN**

Hingga tahun 2022, Indonesia memiliki lebih dari 542 Pemerintah Daerah yang terdiri atas 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota (BPK, 2020). Melihat banyaknya provinsi di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk sebuah desentralisasi dan otonomi daerah dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur tentang beberapa jenis pelayanan umum yang didalamnya semua pelayanan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap mampu dalam melayani masyarakat karena lebih memahami kondisi internal serta kekurangan yang ada. Otonomi daerah juga diharapkan dapat mampu mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat, dengan otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat karena tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, agar lebih efisien dan tepat guna. Selain ukuran kuantitatif, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik (Marselina & Reniza, 2020). Riyadi (2022) menjelaskan bahwa setiap daerah bebas mengatur urusan daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan Solow dipengaruhi oleh tingkat modal, tenaga kerja dan teknologi (Afif & Ciptawaty, 2020). Dengan pembentukan otonomi daerah, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Indonesia dan meningkatkan kemandirian fiskal setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai perhitungan pada produk barang dan jasa di dalam satuan tahun tertentu berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas barang harga konstan (BPS, 2021). Salah satu bentuk otonomi daerah yang telah terbentuk di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Provinsi Lampung pada awalnya merupakan provinsi yang bergabung dengan Sumatera Selatan. Namun pada 18 Maret 1964 Lampung menjadi satu kesatuan provinsi sendiri (Dinas Kominfo Prov. Lampung, 2024). Provinsi Lampung terbagi atas 13 Kabupaten dan 2 Kota. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah ini menjadi harapan besar bagi Provinsi Lampung untuk bisa terus meningkatkan perekonomiannya.

Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Kota Bandarlampung menjadi daerah dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar, tercatat selama lima tahun dapat menyentuh rata-rata sebesar 3,71% sedangkan Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB terendah yaitu hanya sekitar 1,5%. Pada tahun 2020, Indonesia umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya mengalami kondisi yang paling menurun dari setiap tahunnya. Di mana pandemic covid-19 melanda dan menyebabkan penurunan pertumbuhan PDRB secara drastis. Dapat terlihat bahwa masih ada peningkatan sebelum terjadinya covid-19 di tahun 2018-2019. Di tahun 2021 Provinsi Lampung mengalami pemulihan ekonomi yang dapat mendorong laju pertumbuhan PDRB walaupun belum pulih seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Provinsi Lampung juga akan menjadi penentu kebijakan pembangunan bagi para pemegang kebijakan terutama di daerah-daerah untuk menggerakkan seluruh sektor perekonomiannya (Emalia & Farida, 2018).

Terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi alat dalam mengukur performa pertumbuhan PDRB, satu diantaranya tingkat kemandirian keuangannya (Sugiyanto & Musfirati, 2021). Kemandirian fiskal dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung dari pemerintah pusat (BPK, 2024). Jika masing-masing daerah akan mampu berdiri secara mandiri maka setiap pembiayaan dan pembangunan serta dalam pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik tanpa tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menjelaskan tentang kemandirian fiskal yang mana di dalamnya disebutkan bahwa konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Kota Bandar Lampung dan Kota Metro berada pada kondisi menuju kemandirian, sedangkan 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung masih berada pada kondisi belum mandiri. Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi kabupaten dengan tingkat menandirian paling rendah diantara semua Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari pendapatan asli daerah yang belum mencukupi ditambah dengan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang masih sangat tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian bagi semua pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung dalam meningkatkan peta kapasitas fiskalnya masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat ditunjang oleh kebijakan upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Putri, 2022). Daya beli pekerja dapat semakin bergeliat dengan adanya kenaikan upah minimum. Masalah yang sering terjadi pada pembangunan ekonomi adalah ketimpangan antar wilayahnya, suatu provinsi akan lebih maju dibandingkan daerah tetangganya (Pratama, dkk, 2022).

Semua Kabupaten/Kota berada pada tingkat upah minimum dibawah Rp2.800.000. UMK tertinggi yaitu sebesar 14.83% atau sekitar Rp2.770.794, terjadi di Kota Bandar Lampung tahun 2022 sedangkan UMK terendah sebesar 14.55% atau sekitar Rp2.074.800 terjadi di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2018. Hal ini masih menjadi perhatian bersama bahwasannya penghasilan dari upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera lainnya. Tercatat pada tahun 2021 Provinsi Bangka Belitung mampu menembus UMK sebesar Rp3.200.000.

Belanja modal dapat dialokasikan sebagai dasar kebutuhan daerah untuk sarana dan prasarana tiap daerah. Pada realitanya masih banyak penggunaan belanja daerah yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja harus dapat digunakan dengan produktif seperti peningkatan program layanan publik, peningkatan aktivitas pembangunan, serta menstimulasi perekonomian. Hal tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat dan

kesenjangan fiskal dapat diminimalisir. Maka dari itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat dapat melalui peningkatan belanja modal. Pemerintah daerah harus berupaya keras dalam menggali PAD sebesar-besarnya (Hasibuan et al., 2023).

Hasil belanja modal terbesar di dapatkan oleh Kota Bandarlampung dengan rata-rata belanja modal sebesar 101,254% dan hasil belanja modal terkecil diraih oleh Kabupaten Tulang Bawang dengan rata-rata belanja modal hanya sebesar 68,94%. Belanja modal dapat diartikan sebagai pembelanjaan oleh pemerintah daerah guna menambah asset tetap yang memberikan manfaat dalam jangka panjang (Gosal et al., 2022). Hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi ketika belanja modal naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik juga (Maury et al., 2023). Dari data yang sudah dipaparkan di atas, sudah banyak kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan belanja modal secara signifikan. Seharusnya dengan meningkatnya belanja langsung berupa belanja modal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian fiskal di semua daerah Provinsi Lampung. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi ketimpangan, ketergantungan fiskal, serta rendahnya kemandirian fiskal di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Salah satu permasalahan yang sering mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara serta mengkombinasikan modal manusia meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil perkapita. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi (Suliswanto, 2012). Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain (Dewi & Sutrisna, 2014). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. IPM terbesar diraih oleh Kota Bandar Lampung dengan IPM sebesar 78.01% pada tahun 2022 sedangkan IPM terendah diraih oleh Kabupaten Tulang Bawang sebesar 62.88% pada tahun 2018.

Oleh karenanya, penelitian terkait dengan kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk dilakukan agar pertumbuhan ekonomi terus berjalan maju, dapat dipetakan pada setiap daerah di Provinsi Lampung, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran Provinsi Lampung.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kemampuan dari pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pelayanan masyarakat, pembangunan, serta kegiatan pemerintahan yang mana bersumber dari pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer seperti bantuan dari pemerintah pusat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Formulasi perhitungan menurut BPK sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023 tentang upah minimum, dijelaskan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota masing-masing tergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaannya. Adapun pengertian upah minimum sendiri yaitu upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Adapun formula perhitungan upah minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (UM_{(t)} \times (\text{Inflasi} + \text{Pertumbuhan PDB}))$$

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana asset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Peraturan Menteri keuangan No. 91/PMK.06/2007). Adapun rasio belanja modal menurut Sugiarto (2016) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2024). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung IPM menurut BPS (2024) adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Pertumbuhan Ekonomi (PE) merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu daerah pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (BPS, 2021). Salah satu pendekatan perhitungan pendapatan nasional adalah pendekatan pengeluaran maka persamaannya sebagai berikut (Mankiw, 2020):

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDB, dapat dihitung pertumbuhan ekonomi dengan formula sebagai berikut (BAPPEDA, 2018):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PE)} = (\text{PDBt} - \text{PDBt-1}) / (\text{PDBt-1}) \times 100\%$$

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Analisis deskriptif yakni metode analisis dimana data kuantitatif dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara objektif sehingga nantinya dapat memberikan suatu informasi dan gambaran mengenai topik yang dibahas. Analisis kuantitatif merupakan teknik analisis dimana data yang ada berupa numerik. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen/bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen/terikat 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung selama 2018-2022. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen atau database pada laman instansi terkait yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), serta buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode estimasi dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi: common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk menentukan model mana yang baik digunakan dalam penelitian maka diperlukan pemilihan model dengan menerapkan uji Chow, Uji Hausman, dan uji Lagrange Multiple (LM).

### Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melihat manakah model yang paling baik digunakan dalam penelitian dengan melihat probabilitas yang terjadi di dalam variabel. Probabilitas yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Hasil yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Common Effect Model* (CEM). Hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak adanya keberagaman, jika nilai probabilitas yang dihasilkan  $> 0,05$  maka model yang terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM).

Ha = Terdapat keberagaman, jika nilai probabilitas yang dihasilkan  $< 0,05$  maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 1.1 Hasil Regresi Uji Chow Menggunakan Fixed Effects Model**

| Redundant Fixed Effects Tests    |           |         |        |
|----------------------------------|-----------|---------|--------|
| Test cross-section fixed effects |           |         |        |
| Effects Test                     | Statistic | d.f.    | Prob.  |
| Cross-section F                  | 5.971504  | (14,56) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square         | 68.507783 | 14      | 0.0000 |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Tabel 1.1 menunjukkan hasil dari Uji Chow dengan nilai dari F-statistik sebesar 5.971504 dengan d.f. (14,56) dan nilai probabilitas sebesar 0.0000, dapat diartikan bahwa nilai F-statistik lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0.0000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, sehingga model data panel yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* dibandingkan *Common Effect Model*.

### Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Penggunaan *Random Effect Model* harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

Ha: *Fixed Effect Model*

**Tabel 1.2 Hasil Regresi Uji Hausman Menggunakan Random Effects Model**

| Correlated Random Effects - Hausman Test |                   |              |        |
|--|-------------------|--------------|--------|
| Test cross-section random effects        |                   |              |        |
| Test Summary                             | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
| Cross-section random                     | 76.446010         | 4            | 0.0000 |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Tabel 1.2 menunjukkan hasil dari Uji Hausman dengan nilai dari F-statistik sebesar 76.446010 dengan d.f. 4 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000, dapat diartikan bahwa nilai F-statistik lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0.0000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, sehingga model data panel yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* dibandingkan *Random Effect Model*.

**Fixed Effect Model**

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan model yang baik adalah menggunakan *Fixed Effect Model*, artinya tidak diperlukan lagi pengujian Lagrange Multiplier. Berikut ini adalah hasil dari pengujian menggunakan *Fixed Effect Model*:

**Tabel 1.3 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effects Model**

Dependent Variable: PE  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 15  
 Total panel (balanced) observations: 75

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 42.47195    | 69.93117   | 0.607339    | 0.5461 |
| KEMFD    | 0.805180    | 0.056805   | 0.713281    | 0.0078 |
| UMK      | -1.178543   | 5.575544   | -3.798471   | 0.0004 |
| BM       | 1.043195    | 0.654714   | 6.597990    | 0.0000 |
| IPM      | 2.928474    | 0.457105   | 8.594245    | 0.0000 |
| DPC      | -4.165076   | 0.658292   | -6.327099   | 0.0000 |

Effects Specification

|                                       |           |                       |  |          |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--|----------|
| Cross-section fixed (dummy variables) |           |                       |  |          |
| R-squared                             | 0.854394  | Mean dependent var    |  | 3.108933 |
| Adjusted R-squared                    | 0.804094  | S.D. dependent var    |  | 2.569502 |
| S.E. of regression                    | 1.137293  | Akaike info criterion |  | 3.318357 |
| Sum squared resid                     | 71.13895  | Schwarz criterion     |  | 3.936354 |
| Log likelihood                        | -104.4384 | Hannan-Quinn criter.  |  | 3.565117 |
| F-statistic                           | 16.98594  | Durbin-Watson stat    |  | 2.524235 |
| Prob(F-statistic)                     | 0.000000  |                       |  |          |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Tabel 1.3 menunjukkan hasil dari regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model*, didapatkan perhitungan dari masing-masing angka baik konstanta, koefisien, hingga hasil lainnya yang memiliki makna tersendiri guna alat perhitungan dari analisis dan pertimbangan pengambilan keputusan. Adapun persamaan bentuk regresi sebagai berikut:

$$PE = 42.47195 + 0.805180 \text{ KEMFD} - 1.178543 \text{ UMK} + 1.043195 \text{ BM} + 2.928474 \text{ IPM} - 4.165076 \text{ DPC}$$

- a) Konstanta 42.47195 artinya nilai rata-rata dari pertumbuhan maksimal (6.17%) sebesar 42.47% selama periode 2018-2022.

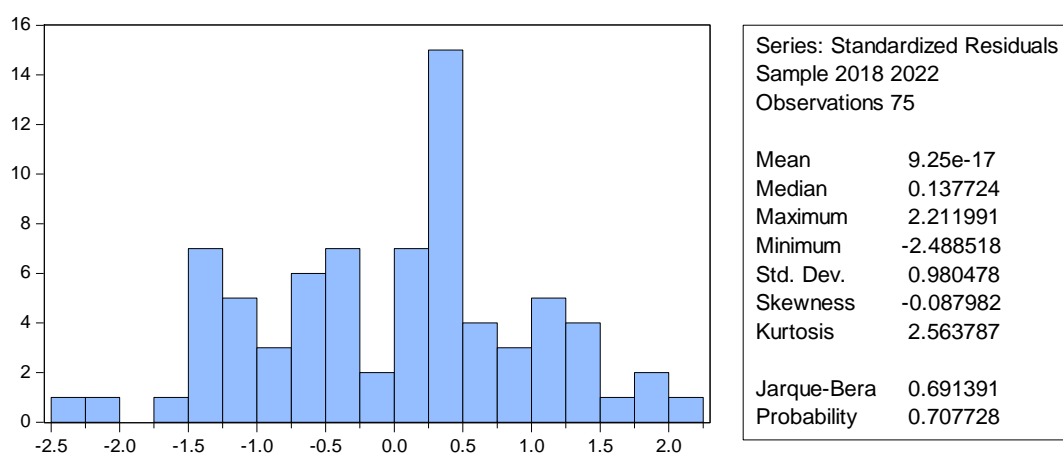
- b) Koefisien KEMFD sebesar 0.805180 yang artinya jika KEMFD mengalami kenaikan sebesar 1%, dengan asumsi variabel UMK, BM, IPM, DPC konstan, maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.80%.
- c) Koefisien UMK sebesar -1.178543 yang artinya jika UMK mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, dengan asumsi variabel KEMFD, BM, IPM dan DPC konstan, maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 1.17%.
- d) Koefisien BM sebesar 1.043195 yang artinya jika BM mengalami kenaikan sebesar 1%, dengan asumsi variabel KEMFD, UMK, dan IPM konstan, maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1.04%.
- e) Koefisien IPM sebesar 2.928474 yang artinya jika IPM mengalami kenaikan sebesar 1%, dengan asumsi variabel KEMFD, UMK, dan BM konstan, maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2.92%.
- f) Koefisien DPC sebesar -4.165076 yang artinya apabila dummy pandemic covid-19 meningkat (kasus terkonfirmasi positif covid-19 meningkat dan berdampak besar pada mekanisme pasar serta pembatasan sosial), maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.16%.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak, model regresi yang baik harus memiliki data yang terdistribusi secara normal. Data dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitasnya lebih dari taraf signifikansi 5%. Adapun hasil dari uji normalitas sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Hasil Uji Normalitas**



**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Berdasarkan hasil uji statistik Jarque-Bera diperoleh nilai probability sebesar 0.394444. Nilai 0.394444 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0.394444 > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah variabel gangguan mempunyai varian yang konstan atau tidak. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas digunakan metode Glejser, yaitu meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya (Widarjono, 2018). Hipotesis untuk pengujian heteroskedastisitas adalah:

- H<sub>0</sub>: Homoskedastisitas
- H<sub>a</sub>: Heteroskedastisitas

**Tabel 1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: ABS\_RES

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -2.667688   | 33.88349   | -0.078731   | 0.9375 |
| KEMFD    | -0.030224   | 0.027524   | -1.098101   | 0.2769 |
| UMK      | 1.356913    | 2.701498   | 0.502282    | 0.6175 |
| BM       | -0.001205   | 0.003172   | -0.379981   | 0.7054 |
| IPM      | -0.236268   | 0.221479   | -1.066772   | 0.2907 |
| DPC      | 0.421633    | 0.318960   | 1.321902    | 0.1917 |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 19 dengan menggunakan metode Glejser didapatkan hasilnya bahwa variabel independen KEMFD, UMK, BM, IPM dan DPC memiliki nilai probabilitas > 0,05%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas di dalam model.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan korelasi antar variabel bebas, jika terdapat hubungan korelasi antar variabel bebas maka model regresi mempunyai masalah multikolinearitas. Nilai koefisien korelasi jika > 0,85% maka di dalam model regresi terdapat masalah multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai koefisien korelasi < 0,85% maka di dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas:

**Tabel 1.6 Hasil Uji Multikolinearitas**

|       | KEMFD    | UMK      | BM       | IPM      | DPC      |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| KEMFD | 1.000000 | 0.319239 | 0.236691 | 0.653288 | 0.132724 |
| UMK   | 0.319239 | 1.000000 | 0.140409 | 0.195912 | 0.823301 |
| BM    | 0.236691 | 0.140409 | 1.000000 | 0.203981 | 0.053964 |
| IPM   | 0.653288 | 0.195912 | 0.203981 | 1.000000 | 0.102499 |
| DPC   | 0.132724 | 0.823301 | 0.053964 | 0.102499 | 1.000000 |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 20, dapat diketahui korelasi antara KEMFD dan UMK sebesar 0.319239, korelasi antara KEMFD dan BM sebesar 0.236691, korelasi antara KEMFD dan IPM sebesar 0.653288, serta korelasi antara KEMFD dan DPC sebesar 0.132724. Selanjutnya melihat korelasi antara UMK dan BM sebesar 0.140409, korelasi antara UMK dan IPM sebesar 0.195912, serta korelasi antara UMK dan DPC sebesar 0.823301. Melihat korelasi antara BM dan IPM sebesar 0.203981, BM dan DPC sebesar 0.053964 serta korelasi antara IPM dengan DPC sebesar 0.102499. Melihat hasil dari koefisien korelasi dengan hasil  $< 0,85$  maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Uji pengaruh parsial (uji-t) bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan uji satu arah dengan taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Adapun hasil dari uji-t sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)**

| Variable | Coefficient | Prob.  | Keterangan             | Kesimpulan |
|----------|-------------|--------|------------------------|------------|
| KEMFD    | 0.805180    | 0.0078 |                        |            |
| UMK      | -1.178543   | 0.0004 |                        |            |
| BM       | 1.043195    | 0.0000 | H <sub>0</sub> ditolak | Signifikan |
| IPM      | 2.928474    | 0.0000 |                        |            |
| DPC      | -4.165076   | 0.0000 |                        |            |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Berdasarkan hasil uji t-statistik yang telah dilakukan, dapat dilihat pengaruh variabel independen secara parsial sebagai berikut:

- a) Hasil uji t pada variabel KEMFD nilai probabilitas sebesar 0.0078 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak. Dengan demikian variabel KEMFD mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

- b) Hasil uji t pada variabel UMK nilai probabilitas sebesar 0.0004 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel UMK mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- c) Hasil uji t pada variabel BM nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel BM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- d) Hasil uji t pada variabel IPM nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel IPM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- e) Hasil uji t pada variabel DPC nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel DPC mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

#### Uji Pengaruh Simultan (Uji-f)

Uji pengaruh simultan (uji-f) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji-f dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Ketika nilai probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya secara serempak variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai probabilitas > 0,05 maka  $H_0$  diterima, artinya secara serempak variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil dari uji pengaruh simultan:

**Tabel 1.8 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji-f)**

|                   |          |                    |          |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| F-statistic       | 16.98594 | Durbin-Watson stat | 2.524235 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |                    |          |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Berdasarkan Tabel 1.8 diketahui bahwa nilai probabilitas (F-Statistic) sebesar 0.000000, nilai nya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara serentak variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen yaitu KEMFD, UMK, BM, dan IPM menjelaskan variabel dependennya yaitu PE. Berikut ini merupakan hasil dari uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>):

**Tabel 1.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.854394 | Mean dependent var | 3.108933 |
| Adjusted R-squared | 0.804094 | S.D. dependent var | 2.569502 |

**Sumber: EViews 10 (data diolah)**

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan, terlihat nilai R-squared sebesar 0.854394 atau 85.42%, yang artinya sebesar 85.42% variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia mampu menjelaskan variasi nilai-nilai pertumbuhan ekonomi. Sisanya sebesar 17.58% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

### SIMPULAN

Pengujian yang dilakukan secara bertahap dan penentuan model penelitian menjadi kunci utama dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Didapatkan uji terbaik dalam penggunaan modal regresi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan melalui pengujian Uji Chow. Pada tahap akhir penelitian melihat pengaruh variabel menggunakan uji t (uji secara parsial), uji f (uji secara simultan) dan pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>). Hasilnya sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Daerah secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0078 < 0.05$ . Nilai koefisien regresi kemandirian fiskal daerah berada pada angka 0.805180 yang artinya setiap meningkatnya kemandirian sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.80% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
2. Upah minimum kabupaten/kota secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0004 < 0.05$ . Nilai koefisien regresi upah minimum berada pada angka -1.178543 yang artinya setiap meningkatnya upah sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.17% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
3. Belanja Modal secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Nilai koefisien regresi kemandirian fiskal daerah berada pada angka 1.043195 yang artinya setiap meningkatnya belanja modal sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.04% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
4. Indeks Pembangunan Manusia secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Nilai koefisien regresi IPM berada pada angka 2.928474 yang artinya setiap meningkatnya IPM sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi sebesar 2.92% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

5. Dummy Pandemi Covid-19 secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Nilai koefisien regresi DPC berada pada angka -4.165076 yang artinya setiap meningkatnya kasus Covid-19 sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.16% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
6. Secara bersama-sama kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Nilai R-squared sebesar 0.854394, yang artinya sebesar 85.43% variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia, mampu menjelaskan variasi nilai-nilai pertumbuhan ekonomi, sisanya sebesar 14.57% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti salah satunya yaitu teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

## **Referensi:**

- Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 609.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2020), Jumlah Pemerintah Daerah
- Badan Pemeriksa Keuangan (2024), Kemandirian Fiskal Daerah
- Badan Pusat Statistik (2024), Indeks Pembangunan Manusia
- Badan Pusat Statistik (2021), Pertumbuhan Ekonomi
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2018), Pertumbuhan Ekonomi
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 106–114.
- Dinas Kominfotik Provinsi Lampung (2024), Sejarah Provinsi Lampung.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19(1), 61-74.
- Gosal, J. S., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96.
- Hasibuan, T., Soleh, A., & Rahman, A. (2023). The Effect Of Capital Expenditure And Local Revenue On Economic Growth In Cities And Regencies In Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 2(1), 35–40.
- Mankiw. (2016). *Principles of Economics 9th Edition*.

- Marselina & Reniza. (2020). *Does Government Intervention Matters on Economic Growth (Case Study ASEAN Countries)*. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2028-2032.
- Maury, G. A., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 23(4), 109–120.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999, Tentang Upah Minimum  
Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2007, Tentang Belanja Modal
- Pratama, A. D., Suparta, I. W., Ratih, A. (2022). *Spatial Autocolleration and Economic Convergence in Lampung Province*. *Journal of Economics and Policy*, 15(1), 29-43.
- Putri, N. H. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 10(1), 1–10.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314.
- Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018.
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Suliswanto, M. (2012). Pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia. *Ub Malang*, 3, 3.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2014, Tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah  
Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Tentang Kemandirian Fiskal Daerah  
Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Upah Minimum  
Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 30 Tentang Ketenaga Kerjaan